

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan luar negeri adalah salah satu sumber perekonomian bagi pembangunan beberapa negara berkembang. Bukan hanya bagi negara penerima bantuan saja, tetapi bantuan luar negeri juga bertujuan meningkatkan keadaan ekonomi dan juga memperluas sasaran industri bagi negara donor. Bantuan luar negeri dianjurkan dengan tujuan mendorong perkembangan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang yang berada di titik dimana negara tersebut tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan negara secara mandiri. Dalam keadaan ini, pemerintah negara berkembang harus melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dengan cara mencari bantuan dari negara asing yang mampu menyediakan modal ataupun investasi untuk menunjang perkembangan ekonomi negaranya (Abate, 2022).

Organisasi Internasional yang menangani bantuan luar negeri adalah OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Organisasi ini berfokus pada peningkatan kinerja ekonomi, penguatan kebijakan ekonomi, dan juga pembangunan suatu negara yang berkaitan dengan sektor ekonomi yang biasa disebut sebagai *development assistance* (OECD, 2025). Terdapat 38 negara yang tergabung sebagai anggota dari organisasi ini, salah satunya adalah Jepang. Negara ini merupakan negara maju yang memiliki orientasi positif dalam menjalankan hubungan kerjasama dengan negara lain. Jepang memberikan bantuan luar negeri

melalui *Official Development Assistance (ODA)* atau bantuan pembangunan resmi yang telah dimulai sejak tahun 1954 dengan bergabung dengan Colombo Plan untuk menyediakan bantuan bantuan kerja sama teknis kepada negara-negara yang membutuhkan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, n.d.).

Dalam penerapannya, Jepang memberikan bantuan kepada India di bidang ekonomi untuk membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan hubungan dengan sesama negara Asia. Hubungan kerjasama kedua negara ini telah terjalin cukup baik sejak tahun 1952 dengan adanya penandatanganan perjanjian damai dan hubungan diplomatik. Pada tahun 1957, kunjungan Perdana Menteri Jepang menjadi kunjungan pertama pemerintah Jepang ke India setelah keduanya menjalin hubungan kerjasama diplomatik. Tepat satu tahun setelah kunjungan tersebut, kedua negara ini mencapai kesepakatan bersama yang ditandai dengan pengiriman bantuan pinjaman dana dari pemerintah Jepang kepada India. Dalam hal ini, India merupakan negara pertama yang menerima bantuan dalam bentuk pinjaman resmi dari Jepang (MOFA, Official Development Assistance (ODA), 2024). Kerjasama ini terus berlangsung dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan jumlah pinjaman dana yang cukup signifikan pada periode tahun 2010-an.

Tabel 1. 1 Data Bantuan Pinjaman Jepang untuk India periode tahun 2012-2016

Tahun	Bantuan Pinjaman
2012	3.531.060 Juta Yen
2013	3.650.590 Juta Yen
2014	1.186.430 Juta Yen

2015	3.664.780 Juta Yen
2016	3.713.450 Juta Yen

Sumber: MOFA Japan

Tabel diatas merupakan data jumlah bantuan pinjaman yang diberikan Jepang kepada India. Negara ini menempati posisi pertama sebagai negara penerima bantuan pembangunan terbesar dari Jepang diikuti oleh negara Indonesia dengan jumlah bantuan 49.360 juta Yen, China dengan jumlah bantuan 33.164 juta Yen, dan Filipina dengan jumlah bantuan 27.374 juta Yen. Sebagai negara yang diutamakan oleh Pemerintah Jepang, India mengalokasikan sebagian besar dana pinjaman untuk pembangunan proyek infrastruktur, perbaikan sektor kesehatan, saluran irigasi, dan pengembangan transportasi (MOFA, Japan's ODA Data by Country, 2018). Berdasarkan data alokasi pinjaman tersebut, pada tahun 2014 Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau lebih dikenal dengan sebutan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menyiapkan rencana kerjasama dalam sektor perkembangan transportasi yang akan direalisasi di wilayah India. Salah satu hasil dari kerjasama yang terjalin oleh kedua negara ini adalah pembangunan proyek kereta cepat yang disepakati sejak 2017 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Proyek ini akan menghubungkan Mumbai yang merupakan pusat kota metropolitan di negara bagian Maharashtra dan Ahmedabad yang juga termasuk ke dalam salah satu kota metropolitan di negara bagian Gujarat dengan pembangunan jalur dan gerbong kereta cepat yang mengadopsi teknologi canggih kereta cepat Jepang (Potsangbam & Arub, 2017).

Untuk menganalisis bentuk implementasi bantuan pembangunan resmi dari Jepang terhadap kerjasama Jepang-India dalam pembangunan proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang berjudul 'Kebijakan *ODA (Official Development Assistance)* Jepang pada pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta Dalam Mencapai *National Railway 2030*' oleh Dafid Herli Yando yang menganalisis mengenai bagaimana motif bantuan luar negeri dilakukan dalam Pembangunan MRT di Jakarta dalam rangka memenuhi target National Railway 2030. Penelitian ini menggunakan teori bantuan luar negeri dengan memfokuskan pembahasan kepada konsep empat motif negara donor, yaitu motif kemanusiaan, motif politik, motif keamanan, dan motif kepentingan nasional (Yando, 2022).

Penelitian yang kedua berjudul 'Kepentingan Bantuan Luar Negeri Jepang Dengan Menggunakan Skema Official Development Assistance (ODA) Dalam Pembangunan Ekonomi Tiongkok' oleh Yuni Ardiani yang menganalisis mengenai kepentingan pribadi Jepang dalam menggunakan bantuan pembangunan resmi sebagai salah satu kebijakan luar negeri negaranya. Penelitian ini menggunakan teori bantuan luar negeri dan juga kepentingan nasional untuk menganalisis kepentingan Jepang dalam memberikan bantuan kepada Tiongkok (Ardiani, 2019).

Yang ketiga adalah penelitian yang berjudul 'Motivasi Di Balik Peningkatan Official Development Assistance Jepang Ke Kawasan Afrika Tahun 2008-2019' yang ditulis oleh Rachmat Afi Azzam Pehang dan Arie Kusuma Paksi yang berfokus pada alasan peningkatan bantuan pembangunan resmi ke Kawasan

Afrika dengan menjelaskan faktor yang mendorong tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional yang didorong oleh faktor ekonomi (Pehang & Paksi, 2021).

Yang menjadi gap antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pemilihan studi kasus yang berada di negara berbeda. Penulis melakukan analisis implementasi bantuan pembangunan resmi Jepang dalam proyek pembangunan kereta cepat Mumbai-Ahmedabad yang merupakan dua kota besar di India. Pada penelitian pertama, terdapat persamaan teori yang digunakan yaitu teori bantuan luar negeri. Namun, yang membedakan kedua penelitian ini adalah adanya pembahasan mengenai motif negara donor yang dianalisis oleh penulis sebelumnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada penjabaran implementasi bantuan pembangunan secara khusus dalam pembangunan proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad. Pada penelitian kedua dan ketiga, penulis sebelumnya hanya berfokus pada kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara Jepang saja sehingga belum menganalisis secara khusus mengenai implementasi bantuan luar negeri terhadap proyek yang dilaksanakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang dipilih adalah ‘Bagaimana implementasi bantuan luar negeri Jepang dalam pembangunan kereta cepat Mumbai-Ahmedabad di India periode 2017-2023?’

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan penyusunan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan pengetahuan secara umum dalam bentuk karya tulis ilmiah yang telah dipastikan keabsahannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui data dan informasi yang dikumpulkan secara akademis dengan teori dan fenomena yang saling terikat. Selain itu, penelitian ilmiah ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir berupa skripsi program studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara khusus**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipilih, penelitian ini bertujuan secara khusus untuk melihat dan memberikan penjelasan secara argumentatif dengan struktur yang sistematis untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi bantuan luar negeri Jepang dalam pembangunan proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad India pada periode 2017-2023.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Bantuan Luar Negeri untuk Pembangunan Ekonomi**

Hans Morgenthau dalam tulisannya ‘A Political Theory of Foreign Aid’ pada tahun 1962, mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai salah satu alat pemenuh kewajiban bagi negara kaya kepada negara miskin (Morgenthau, 1962). Sedangkan menurut Chen Lu dan Weiwei Fan, bantuan pembangunan merupakan bantuan ekonomi berskala besar yang ditujukan bagi negara berkembang dalam

bentuk dana hibah, pinjaman, maupun bantuan teknis dari departemen atau lembaga resmi negara maju. Tujuan dari bantuan ini adalah membantu meningkatkan perekonomian demi tercapainya pembangunan ekonomi yang layak di negara tersebut (Lu & Fan, 2014). Terdapat beberapa elemen penting yang menjadi persyaratan utama dalam pelaksanaan bantuan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara, kedua dilakukan dan ditujukan untuk pembangunan ekonomi dengan fokus utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga adalah bantuan finansial yang bersifat konsensi (Ardiani, 2019).

Bantuan luar negeri digambarkan sebagai sebuah keadaan dimana setiap pihak yang berhubungan membutuhkan adanya perubahan politik yang drastis sebagai syarat utama bagi keberhasilannya. Terdapat dua sisi yang dapat dilihat dari adanya perubahan politik dari negara penerima bantuan dimana perubahan politik akan bersifat positif dengan meningkatkan peluang keberhasilan, tetapi juga akan menimbulkan kecurigaan akan adanya eksploitasi dari negara donor kepada negara penerima. Berdasarkan keadaan ini, ditemukan adanya dua kemungkinan yang terjadi apabila suatu negara menerima bantuan luar negeri, yaitu kegagalan yang mengakibatkan penurunan fungsi birokrasi suatu negara atau keberhasilan yang dapat mendukung perkembangan negara penerima (Randhawa, 2012).

Terdapat enam jenis bantuan luar negeri menurut Hans Morgenthau, yaitu bantuan kemanusiaan, bantuan penghidupan, bantuan suap, bantuan keamanan, bantuan kehormatan, dan bantuan pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengalisis menggunakan teori bantuan luar negeri dalam bentuk

bantuan pembangunan ekonomi yang didefinisikan sebagai instrumen yang mengandung standar ekonomi murni sehingga keberadaannya dapat dihitung dengan pasti. Pembangunan ekonomi dianggap sebagai langkah ekonomi yang ketat untuk melakukan penyediaan modal dan juga pengetahuan ekonomi. Bantuan ini dapat diimplementasikan melalui bantuan dana pembangunan infrastruktur, bantuan teknis, serta dukungan teknologi dan pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara (Morgenthau, 1962).

#### **1.4.2 Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur**

Bentuk implementasi pertama dalam pemberian bantuan pembangunan internasional adalah berupa bantuan pemberian dana untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu bentuk pemberian dana ini adalah berupa *Development Loans* atau bantuan dalam bentuk pinjaman. Bantuan ini yang diberikan oleh negara donor untuk menunjang pertumbuhan ekonomi negara penerima. Bantuan ini tidak diberikan secara percuma, tetapi terdapat kewajiban dari negara penerima untuk mengembalikan transfer dana yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu (Holsti, 1983). Pinjaman terdiri dari pinjaman bilateral dan multilateral dimana sumber pembiayaan utamanya dapat berupa investasi dan pinjaman uang (Juliani, 2022). Pinjaman ini memungkinkan pemerintah suatu negara dengan perekonomian menengah untuk mendapatkan dana tambahan untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang bermanfaat. Salah satu tujuan dari pemberian pinjaman ini adalah mendukung pembangunan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang (Bulow & Rogoff, 2005).

K.J. Holsti menjelaskan bahwa bantuan pinjaman mendukung negara penerima dengan menyediakan dana pinjaman bunga rendah dengan jangka pembayaran panjang untuk membiayai upaya pembangunan negara. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pembayaran negara penerima terhadap negara donor dengan menciptakan pinjaman lunak yang dapat dijadikan sumber utama pinjaman pembangunan bagi negara berkembang. Namun, bantuan pinjaman pembangunan juga dapat digunakan sebagai salah satu alat negara donor untuk mencapai tujuan politik dan strategisnya di tingkat global. Dalam kasus ini, terdapat banyak kejadian dimana negara penerima bantuan cenderung didorong untuk menjalin hubungan ekonomi yang menguntungkan negara pemberi bantuan. Negara penerima biasanya diharuskan menggunakan dana pinjaman untuk membeli produk ekonomi dari negara donor sehingga menimbulkan dampak keterikatan terhadap produk donor. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh negara donor untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri penerima dengan menciptakan ketergantungan ekonomi (Holsti, 1983).

### **1.4.3 Bantuan Teknis**

*Technical Assistance* atau bantuan teknis adalah bantuan yang dirancang untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan. Bantuan teknis merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan, penyebaran teknologi, dan pengembangan kerangka kelembagaan (Dunst, Annas, Wilkie, & Hamby, 2019). Program ini dikhususkan untuk menunjang pengembangan kemampuan dan keterampilan dibanding pengiriman bantuan berbentuk barang dan dana. Dalam hal ini, suatu

negara yang menjadi donor akan mengadakan program pelatihan ataupun menyediakan peralatan pelatihan untuk menunjang peningkatan pengetahuan teknis negara penerima bantuan (Katz & Wandersman, 2016). Bantuan ini dirancang untuk membantu individu maupun kelompok di negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan (Holsti, 1983).

Bantuan teknis dapat berupa kerja sama teknis yang merupakan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia. Pendekatan bantuan teknis sangat bergantung pada keterampilan tenaga ahli dari negara maju yang bekerja sama untuk melatih staf pemerintahan ataupun proyek dari negara penerima. Bantuan ini diharapkan mampu menumbuhkan keterampilan dan fungsi jangka panjang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah (Holsti, 1983). Karakteristik utama dari bantuan ini adalah adanya keterlibatan dari negara donor dalam memberikan pelatihan teknis hingga dukungan implementasi di lapangan terhadap proyek negara penerima. Bantuan ini cenderung berfokus untuk memberikan solusi teknis pada masalah sosial dan politik yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam proses pembangunan sektor publik maupun proyek pemerintahan (Nastase, Rajan, French, & Bhattacharya, 2020).

#### **1.4.4 Transfer Pengetahuan**

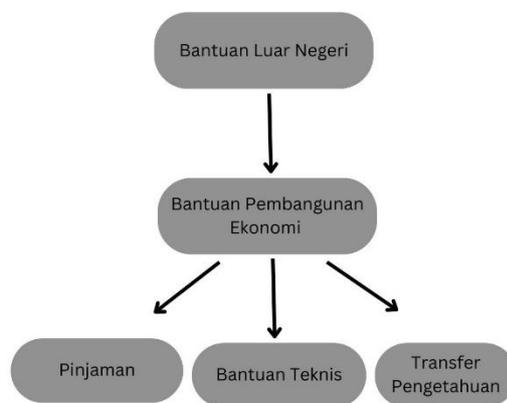
Transfer pengetahuan didefinisikan sebagai proses pertukaran pengetahuan antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak bertugas untuk mengkomunikasikan

pengetahuan sementara pihak lain bertugas sebagai penerima untuk mengasimilasi pengetahuan tersebut. Fokus utama dari transfer pengetahuan adalah interaksi yang menghasilkan pertukaran pengetahuan untuk diterapkan secara khusus oleh pihak penerima. Komunikasi yang menghasilkan pertukaran pengetahuan terjadi antara individu, kelompok, maupun organisasi sehingga penerima pengetahuan mendapatkan pemahaman kognitif, memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan menyebarkannya kepada kelompok lain. Terdapat perbedaan tipis antara transfer pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Dalam hal ini, berbagi pengetahuan cenderung dilakukan antara individu dengan individu lain. Sementara itu, transfer pengetahuan lebih sering dilakukan oleh kelompok maupun organisasi yang memiliki persamaan proyek maupun latar belakang (Paulin & Suneson, 2015).

Dalam penelitiannya, Timothy Nokes Malach membandingkan tiga jenis mekanisme transfer pengetahuan. Pertama adalah *analogical transfer* atau transfer analogis yang memanfaatkan penelitian atau penemuan sebelumnya untuk dijadikan contoh masalah atau situasi untuk menarik kesimpulan yang relevan. Dalam hal ini, pengetahuan yang ditransfer diasumsikan sebagai representasi prosedural untuk menghasilkan pemetaan proyek atau pengetahuan selanjutnya. Kedua adalah *knowledge compilation* atau komplikasi pengetahuan yang merupakan sebuah mekanisme dimana pengetahuan sebelumnya dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah baru. Mekanisme ini memungkinkan kelompok ataupun individu untuk menghasilkan aturan dan pengetahuan baru melalui interpretasi saran, intruksi, maupun taktik yang sebelumnya sudah dilakukan. Mekanisme yang ketiga adalah *constraint violation* atau pelanggaran

kendala dimana pengetahuan sebelumnya digunakan sebagai pertimbangan untuk evaluasi masalah baru. Proses transfer pengetahuan ini menggunakan kendala pada pengetahuan sebelumnya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul pada proyek yang baru (Malach, 2009).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



*Sumber: Pemikiran penulis*

Salah satu bentuk dari bantuan luar negeri adalah bantuan pembangunan ekonomi. Bantuan ini diberikan melalui pinjaman, bantuan teknis dalam pelaksanaan proyek, dan transfer pengetahuan. Dalam proses implementasi bantuan luar negeri, negara donor akan mengirimkan bantuannya kepada negara penerima untuk dimanfaatkan sebagai sarana mendorong pembangunan berkelanjutan. Efektivitas dari bantuan ini bergantung pada pendampingan dan kerjasama jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara.

## 1.6 Argumentasi Utama

Penulis memiliki argumentasi bahwa implementasi bantuan luar negeri dalam pembangunan proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad India dilakukan dalam bentuk: pinjaman, bantuan teknis, dan transfer pengetahuan yang melibatkan kedua belah pihak. Bantuan dalam bentuk pinjaman diberikan pada periode satu di tahun 2017 sebesar 100 juta Yen dan bertambah 300 juta Yen pada periode dua di tahun 2022 dengan tenor waktu pengembalian 50 tahun. Pinjaman ini akan digunakan untuk biaya pembangunan 12 stasiun kereta, pembiayaan pembangunan gerbong kereta melalui program ‘*Make in India*’, pembebasan lahan, studi penilaian dampak sosial, biaya pelatihan staff.

Bantuan teknis dilakukan melalui kolaborasi kerjasama antara JICA, Kementerian Perumahan dan Urusan Perkotaan India, Pemerintah India, dan Kementerian Perkeretaapian India telah menandatangani R/D untuk untuk proyek kerja sama teknis yang diberi nama *Project for Station Area Development along Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project*. Bantuan ini diberikan dalam bentuk kerjasama antara agensi kontraktor Jepang dengan kontraktor India yang terdiri dari Japan Railway Track Consultants (JRTC), Japan Railway Technical Service (JARTS), National High Speed Railway Corporation Ltd (NHSRCL) dan IRCON International Ltd.

Sedangkan bantuan dalam bentuk transfer pengetahuan dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli Jepang ke India untuk melakukan transfer pengetahuan untuk menunjang peningkatan modalitas fungsi stasiun dan pengembangan area

stasiun. Dalam hal ini tenaga ahli Jepang berkontribusi untuk memperkenalkan teknologi kereta cepat Jepang kepada pegawai kontraktor India. Agensi kontraktor Jepang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam program ini adalah Japan Railway Technical Service (JARTS) yang bertugas untuk mengoordinasikan dan mengerahkan para ahli dari Jepang dalam konstruksi Shinkansen di Jepang untuk memberikan pelatihan, sertifikasi, dan layanan konsultasi kepada pihak India

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran maupun informasi yang detail mengenai suatu fenomena yang terjadi. Dengan tipe penelitian dan studi kasus yang telah dipilih sebelumnya, maka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi bantuan luar negeri Jepang dalam bentuk pinjaman dana, bantuan teknis, dan transfer pengetahuan melalui kerjasama Jepang dan India dalam pembangunan cepat Mumbai-Ahmedabad periode tahun 2017-2023 berdasarkan teori dan penelitian empiris sebelumnya untuk menguji hipotesis yang ditemukan.

### **1.7.2 Jangkauan penelitian**

Penulis memilih jangkauan waktu tahun 2017-2023 dimana tahun 2017 menjadi titik awal kesepakatan antara India dan Jepang dalam melakukan kerjasama pembangunan jalur dan gerbong kereta cepat Mumbai-Ahmedabad, sementara jangkauan waktu akhir dipilih karena karena laporan terakhir mengenai pembangunan kereta cepat Mumbai-Ahmedabad dari website *Japan International*

*Coorporation Agency* diterbitkan pada tahun 2023 meskipun proyek tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Jangkauan variabel independent dalam penelitian ini adalah bantuan luar negeri Jepang yang merupakan variabel utama yang mampu mempengaruhi variabel lain. Sementara itu, variabel *dependent* yang diteliti oleh penulis adalah kerjasama Jepang-India dalam proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad pada tahun 2017-2023.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah studi pustaka dengan menggunakan sumber yang berasal dari artikel, jurnal, dan publikasi lainnya yang masih relevan untuk mendapatkan data penelitian yang berfokus pada kerjasama dalam bentuk investasi, bantuan ekonomi, bantuan teknis, transfer pengetahuan, dan sumber daya manusia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah maupun organisasi internasional yang terlibat dalam penelitian. Data lain juga akan didapatkan melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku, laporan, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memaparkan bagaimana implementasi bantuan luar negeri Jepang dalam pembangunan kereta cepat Mumba-Ahmedabad India. Teknik analisis kualitatif merupakan sebuah penelitian tanpa data numerik sehingga tidak menggunakan metode akurasi statistik. Dalam teknik analisis ini, penulis akan membuat

kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan melalui penalaran induktif dan deduktif sehingga mampu menjelaskan dinamika hubungan dalam fenomena yang diteliti.

### **1.7.5 Sistematis Penulisan**

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 4 bab yang terorganisir secara jelas sesuai dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan:

#### **Bab 1**

Dalam bab ini akan terdapat proposal penelitian yang menjadi dasar atas penelitian yang hendak dilakukan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian yang disusun atas tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

#### **Bab 2**

Dalam bab ini akan berisi penjelasan mengenai implementasi bantuan luar negeri Jepang dalam bentuk pinjaman (*loans*) untuk pembangunan proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad India pada tahun 2017-2023.

#### **Bab 3**

Dalam bab ini akan berisi penjelasan mengenai implementasi dan analisis bantuan luar negeri Jepang dalam bentuk bantuan teknis dan transfer pengetahuan untuk pembangunan proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad India pada periode tahun 2017-2023.

#### Bab 4

Bab terakhir dalam penelitian ini akan berisi kesimpulan serta saran dari beberapa bab sebelumnya. Kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian yang telah dianalisa berdasarkan fenomena dan teori yang ditentukan. Sementara saran yang diberikan selama proses penyusunan penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah acuan untuk menyempurnakan penelitian ini.